



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 13 Maret 2023/Periodik - 2022)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN  
**UNIT KERJA** : PIMPINAN TERTINGGI

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : YULHAIDIR
2. Jabatan : BUPATI
3. NHK : 174311

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 962.500.000

1. Tanah Seluas 750 m2 di KAB / KOTA SERUYAN, HASIL SENDIRI  
Rp. 60.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 794 m2/189 m2 di KAB / KOTA  
SERUYAN, HASIL SENDIRI Rp. 395.000.000
3. Tanah Seluas 360 m2 di KAB / KOTA SERUYAN, HASIL SENDIRI  
Rp. 27.500.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 392 m2/175 m2 di KAB / KOTA  
SERUYAN, HASIL SENDIRI Rp. 190.000.000
5. Tanah Seluas 59500 m2 di KAB / KOTA SERUYAN, HASIL  
SENDIRI Rp. 200.000.000
6. Tanah Seluas 6000 m2 di KAB / KOTA SERUYAN, HASIL SENDIRI  
Rp. 90.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** Rp. 96.000.000

1. MOBIL, TOYOTA MINI BUS Tahun 2005, HASIL SENDIRI Rp.  
81.000.000
2. MOTOR, HONDA SOLO Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp.  
15.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** Rp. 4.000.000

**D. SURAT BERTAHAGA** Rp. ----

**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 583.701.446

**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----

**Sub Total** Rp. 1.646.201.446



III. HUTANG

Rp. ---

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp.

1.646.201.446

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.